

**ANALISIS PERAN *E-GOVERNMENT* DALAM MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN LITERASI
DIGITAL DAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi kasus di Kelurahan Desa Dagangan kecamatan Parengan
Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi

Oleh:

RISA AFIFATUR ROHMAH

NPM. 22101082151



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2025

ABSTRAKSI

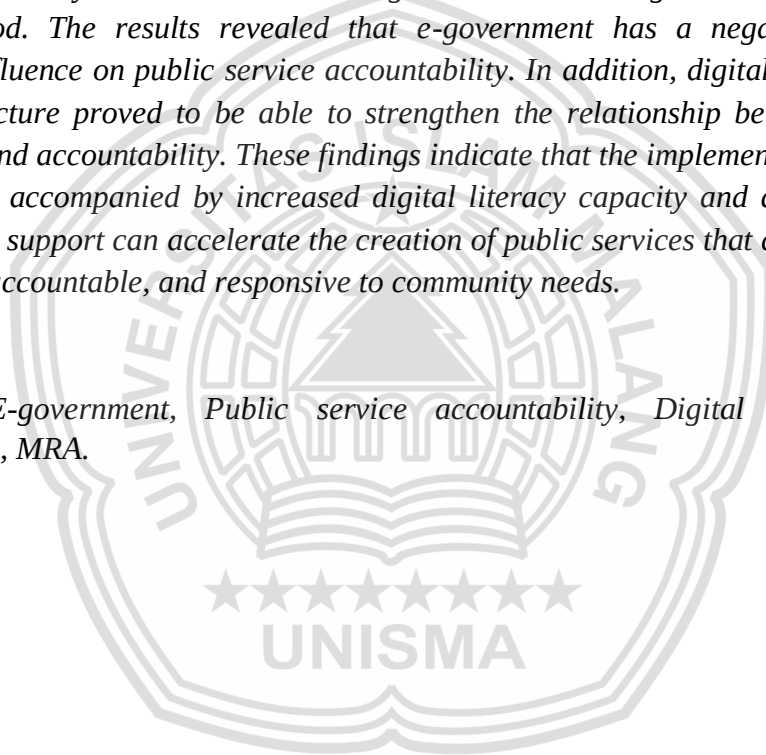
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana peran *e-government* dalam mendorong peningkatan akuntabilitas pelayanan publik di Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dengan mempertimbangkan literasi digital dan infrastruktur sebagai variabel moderasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta hambatan yang muncul akibat rendahnya tingkat literasi digital dan keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada 363 responden yang telah memanfaatkan layanan *e-government*. Analisis data dilakukan dengan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-government* berpengaruh negatif namun signifikan terhadap akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, literasi digital dan infrastruktur terbukti mampu memperkuat hubungan antara *e-government* dan akuntabilitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan *e-government* yang disertai dengan peningkatan kapasitas literasi digital serta dukungan infrastruktur yang memadai dapat mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: *E-government*, Akuntabilitas pelayanan publik, Literasi digital, Infrastruktur, MRA.

ABSTRACT

This study was conducted to examine how the role of e-government in encouraging increased accountability of public services in Dagangan Village, Parengan Subdistrict, Tuban Regency, by considering digital literacy and infrastructure as moderating variables. The background of this study is based on the importance of transparency and accountability aspects in public services, as well as the obstacles that arise due to low levels of digital literacy and limited infrastructure in rural areas. This research uses a quantitative approach through distributing questionnaires to 363 respondents who have utilized e-government services. Data analysis was conducted using the Moderated Regression Analysis (MRA) method. The results revealed that e-government has a negative but significant influence on public service accountability. In addition, digital literacy and infrastructure proved to be able to strengthen the relationship between e-government and accountability. These findings indicate that the implementation of e-government accompanied by increased digital literacy capacity and adequate infrastructure support can accelerate the creation of public services that are more transparent, accountable, and responsive to community needs.

Keywords: *E-government, Public service accountability, Digital literacy, Infrastructure, MRA.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Setiap negara perlu memiliki tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik dan memenuhi harapan masyarakat. Aparat pemerintah bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip akuntabilitas pelayanan publik sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kewenangan yang mereka miliki, sistem akuntabilitas di rancang guna menciptakan institusi yang transparan, dapat di pertanggung jawabkan, dan di percaya oleh masyarakat (Kutika et al., 2021). Akuntabilitas merupakan kewajiban institusi untuk bertindak jujur sebagai pengelola penguasaan khususnya dalam melaksanakan program, memberi arahan, mengambil keputusan, serta menyampaikan laporan kinerja kepada pihak yang lebih tinggi maupun masyarakat. Prinsip ini menjadi faktor utama dalam membangun tata kelola institusi yang baik dan meningkatkan transparansi di berbagai bidang. Selain itu, akuntabilitas memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia (Gioh, 2021).

Pelayanan publik adalah kewajiban bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada dasarnya pelayanan publik mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama yang terus diperbaiki dan di awasi oleh masyarakat (Kushartiningsih et, al, 2021). Pemerintah telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan

publik, namun masih terdapat berbagai kelemahan yang terlihat dari banyaknya aksi protes masyarakat akibat ketidakpuasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, oleh karena itu untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, aparatur pemerintah perlu bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan hasil pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat, dan wujud nyata dari akuntabilitas pelayanan publik (Ignasius et al., 2023)

Pelayanan publik memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti, Pendidikan, Kesehatan, dan keamanan, Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, penyelenggaraan pelayanan publik harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sehingga memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat (Natika, 2024). Tantangan dalam pelayanan publik tidak hanya terletak pada upaya menciptakan pelayanan yang efisien, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan di berikan secara adil tanpa memandang status masyarakat yang di layani, dengan demikian akuntabilitas di harapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah. melalui akuntabilitas, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan benar dan optimal serta mampu mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki (Tonnyl, 2022).

Era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 membawa dampak yang tak terelakkan, sebagai respon banyak pemerintah di berbagai negara telah mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk beradaptasi dan memanfaatkan peluang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat

(Agustin et al., 2024). Pemerintah di harapkan bisa menjadi lebih terbuka, transparan, akuntabel dan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu adanya penggunaan teknologi informasi di sektor publik yang dapat menjamin transparansi dalam melakukan pelayanan masyarakat. salah satu faktor untuk mencapai tujuan akuntabilitas pelayanan publik yaitu dengan menerapkan *e-government* untuk mendukung operasional pemerintahan dan memberikan layanan publik secara digital atau online (Ranti et al., 2023).

Penerapan *e-government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan layanan pemerintah. Selain itu *e-government* juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan menyediakan mekanisme pemantauan pelaporan yang lebih baik. *E-government* memungkinkan menyebar luaskan informasi melalui platform digital seperti website dan aplikasi mobile yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas *e-government* mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab dan akuntabel kepada rakyat atas semua tindakan dan keputusan yang akan di ambil (Rizka et al., 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai menerapkan berbagai inisiatif *e-government* sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat transparansi, Namun penerapan *e-government* di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Adapun kendala yang di hadapi umumnya terbatasnya infrastruktur teknologi, penolakan terhadap perubahan di

kalangan pejabat pemerintah, dan rendahnya literasi digital di masyarakat. Langkah untuk mengatasi hambatan ini memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk investasi pada infrastruktur teknologi, pelatihan dan Pendidikan karyawan dan masyarakat, serta pengembangan kebijakan untuk mendukung adopsi *e-government* (Nastia, 2024).

Pada era digital ini, literasi digital menjadi kunci bagi individu untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menghadapi tantangan global, hal ini mencakup penguasaan TIK secara efektif, kritis, dan etis termasuk keterampilan mencari, menilai serta mengolah informasi, berkomunikasi dan berkolaborasi secara digital. Lebih dari sekedar memahami teknologi, literasi digital mendorong pemanfaatannya secara positif dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Hal ini menunjukkan bahwa memperluas literasi digital dalam masyarakat menjadi hal yang krusial agar setiap individu dapat berpartisipasi secara aktif dengan memanfaatkan teknologi secara optimal untuk memberdaya masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan (Putri et al., 2024)

Setiap negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Salah satu indikator kesejahteraan tersebut adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, kualitas hidup yang baik tidak hanya ditandai oleh bertambahnya jumlah dan cakupan fasilitas, tetapi juga bagaimana individu menilai serta merasakan perbaikan dalam layanan yang berhubungan dengan kebutuhan infrastruktur. Infrastruktur berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional serta daerah. Sebagai bagian

dari pembangunan fisik, infrastruktur mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, ketersediaan dan efektivitasnya meningkatkan kesejahteraan sosial, sementara infrastruktur yang tidak berfungsi optimal dapat memicu permasalahan sosial termasuk penolakan sosial (BAPPEDA, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *e-government* dapat memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas, *e-government* juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi korupsi. Hal itu dapat di lihat pada studi yang di lakukan oleh negara-negara yang mengadopsi *e-government* cenderung memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Demikian dapat di simpulkan bahwa *e-government* tidak hanya alat untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tapi juga mekanisme untuk meningkatkan tata kelola pemerintah (Musri et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis peran *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik dengan literasi digital dan infrastruktur sebagai variabel moderasi melalui penyebaran kuesioner kepada pihak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai pengguna layanan dan pegawai pemerintah desa. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan Pembangunan Indonesia dan praktik *e-government* guna meningkatkan akuntabilitas secara optimal. Dengan demikian dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik dengan literasi digital dan infrastruktur sebagai variabel moderasi”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik ?
2. Bagaimana literasi digital dapat memoderasi peran *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik ?
3. Bagaimana infrastruktur dapat memoderasi peran *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis peran *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
2. Untuk mengetahui literasi digital dalam memoderasi peran *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
3. Untuk mengetahui infrastruktur dalam memoderasi peran *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Di harapkan penelitian ini akan meningkatkan wawasan tentang peran *e-government* dalam konteks pemerintahan, khususnya pada peran *e-government* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pelayanan publik di tingkat daerah. Penelitian ini juga di harapkan bisa berkontribusi untuk memperdalam teori tata kelola berbasis digital dan dampaknya terhadap pelayanan publik dengan menganalisis peran *e-government* dalam memberikan akses informasi dan mengurangi birokrasi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti selanjutnya, di harapkan adanya kemauan dan tekad untuk memperluas wawasan tentang pengaruh *e-government* dalam sektor publik di era digital ini.
2. Bagi institusi, tujuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan daftar rujukan dan referensi oleh mahasiswa lainnya dengan fokus dampak positif yang di hasilkan *e-government* dalam sektor publik.
3. Bagi regulasi sektor pemerintah, di harapkan jadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan sistem pemerintahan yang lebih modern sehingga tercipta pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam hasil dan pembahasan diatas, maka terdapat beberapa kesimpulan di antaranya sebagai berikut :

1. Variabel akuntabilitas pelayanan publik, diperoleh nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,38 dari skala *likert* 1-5, Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan “setuju” bahwa pemerintah desa Dagangan telah menerapkan prinsip akuntabilitas secara maksimal, yang meliputi aspek transparansi, tanggung jawab, dan upaya membangun kepercayaan publik.
2. Variabel *e-government* memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,21 dari skala *likert* 1-5 yang berarti “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai pelaksanaan *e-government* di Desa Dagangan sudah berjalan dengan cukup baik, memberikan kemudahan dalam pelayanan publik secara digital, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.
3. Variabel literasi digital memperoleh nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,30 dari skala *likert* 1-5. yang berarti “setuju”. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memanfaatkan teknologi, sehingga turut menunjang penggunaan layanan publik berbasis digital di Desa Dagangan.

4. Variabel infrastruktur memperoleh nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,12 dari skala *likert* 1-5, yang berarti “setuju”. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur di Desa Dagangan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi, dianggap cukup mendukung pelaksanaan layanan *e-government*, meskipun masih dibutuhkan peningkatan dan pemerataan akses di seluruh wilayah desa.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti telah melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur ilmiah, namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan seperti :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *e-government* berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pelayanan publik, namun secara teori seharusnya menunjukkan hasil positif dan signifikan.
2. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner yang bersifat tertutup dan terstruktur, sehingga dapat membatasi informasi yang diperoleh.
3. Metode pengumpulan data dari penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, sehingga informasi yang diperoleh belum lengkap karena responden hanya menjawab pernyataan yang telah disediakan.
4. Kuesioner hanya dibagikan kepada responden yang pernah menggunakan *e-government*, masyarakat tidak memiliki pengalaman menggunakan layanan *e-government* tidak dilibatkan dalam sampel, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya mewakili pandangan seluruh masyarakat.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah di sebutkan diatas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan adanya sosialisasi penerapan *e-government* dan pendampingan secara berkelanjutan kepada masyarakat.
2. Di sarankan untuk menggunakan metode pengumpulan data yang lebih bervariasi (kuantitatif dan kualitatif) seperti melakukan wawancara yang mendalam terkait akuntabilitas pelayanan publik.
3. Di sarankan untuk menambah variabel penelitian seperti kebijakan pemerintah, budaya organisasi, kompetensi SDM atau faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pelayanan publik.
4. Di sarankan untuk melibatkan seluruh masyarakat guna memperoleh pemahaman yang lebih luas terkait pengetahuan, kendala, serta minimnya partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya dapat memberikan masukan yang lebih komprehensif dalam mendorong peningkatan penggunaan layanan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. W., & Harianti, S. (2023). *Pengelolaan infrastruktur kota dan wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Agustin, D., Utami, S. S., Kushariyadi, K., Suprayitno, D., & Dwiwijaya, K. A. (2024). *Teori Komprehensif Pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). *Attitude-Behavior Relations: A Theoretical Analysis And Review Of Empirical Research*. 8(4), 888.
- amaliah, S., M., Hafiar.H., & dewi.R. (2023). *Analisis Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi Indonesia Sebagai Implementasi Corporate Digital Responsibility terhadap E-Government*.
- Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior. Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesi. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>
- Arwien, R. T., Wirawan, Z., Veryani, A. N., Sahabuddin, E., & Sari, J. (2024). Pelatihan literasi digital dalam mendukung sustainable development berwawasan lingkungan hidup. *Malebbi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–11.
- Bao, B., Paramma, P., Nurak, A., & Ayomi, hendrik vallen. (2024). E-government dan akuntabilitas sistem pemerintah. *Jurnal of Social Science Research*, 4(4).
- BAPPEDA. (2024). *Executive Summary Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Ngawi*. BAPPEDA Provinsi jawa timur. <https://bappeda.ngawikab.go.id/wp-content/uploads/2025/01/Executive-Summary-IKLI-Final-2024.pdf>
- Batool, Z., Bokhari, S., & Akbar, M. (2020). Does infrastructure contribute to inclusive growth. *Journal of Economics*, 1(1), 11–27.
- Dhea Adinda Syafitri, Sutiawati Sutiawati, & Ichsan Fauzi Rachman. (2024). Menghadapi Tantangan Digital: Peran Literasi Digital Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 145–156. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.106>
- Gioh, A. (2021). Pelayanan Publik E-Government Di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(1).
- Harsono, I., Sutanto, H., Rois, I., Faadliysnti, L., & Mulawiani, B. S. W. (2024). *Kontribusi Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia*. 18(1), 196–208.

- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>
- Ignasius, M., Sakir, M., & Abdussamad, N. (2023). Pengaruh Profesionalisme Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kota Timur. *PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN*, 2(1), 33–52. <https://doi.org/10.59713/projip.v2i1.385>
- Imam ghozali. (2020). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21. *Semarang : Badan Penerbit UNDIP*.
- Irawan, B. (2020). E-government sebagai bentuk baru dalam pelayanan publik: sebuah tinjauan teoritik. *Jurnal Paradigma*, 4(3), 200–209.
- Janna, nilda miftahul, & Herianto, M. P. (2021). *konsep uji validitas dan reabilitas dengan menggunakan spss*.
- Kristian, I., Nuradhawati, R., & Ristala. (2024). Peran e-government dalam meningkatkan transparansi publik di indonesia (studi kasus pada pemerintah kabupaten bandung). *Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 252–263.
- Kurniati, poni sukaesih, Gislawati, ranti tri, Safitri, faiza nur, & Lutpi, arijal julhaijan. (2023). implementasi kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kota bandung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah*, 9(4), 875–886.
- Kushartiningsih, R., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).
- Kutika, N., Posumah, J., & Mambo, R. (2021). Akuntabilita pelayanan publik di kantor camat malalayang kota manado. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(105).
- Liana. (2009). Penggunaan MRA dengan SPSS untuk menguji pengaruh variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. *Jurnal Teknologi Informasi*, 14(2), 90–97. <https://www.scribd.com/document/217927600/Liana-2009-Penggunaan-MRA-Dengan-Spss-Untuk-Menguji-Pengaruh-Variabel-Moderating-Terhadap-Hubungan-Antara-Variabel-Independen-Dan-Variabel-Dependen>
- Ma'ruf, P., Sakir, M., & Bau, H. (2021). Birokrasi Pelayanan Publik di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Public. Hulondalo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 34–49.
- Mu'min, M. M. (2022). *Pengaruh Ifrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Utara (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo)*.

- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). . Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 45–57.
- Musri, M., Pasaribu, F. R., Khudri, Ariyati, Y., & Rahman, Y. (2024). Implementasi e-government dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adminitrasi negara. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 8888–8893.
- Nadila, S. (2021). implementasi electroik government dalam mewujudkan good governance dan smart city. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(3), 72–83.
- Nastia. (2024). Transformasi digital melalui inovasi e-government pada pemerintah daerah kabupaten buton selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 12(02), 268–281.
- Natalia, K., Johnny, H. posuma., & mambo rully. (2021). *Akuntabilitas pelayanan publik di kantor camat malalayang kota manado*. 7, 2338–9613.
- Natika, L. (2024). Transformasi pelayanan publik di era digital: menuju pelayanan masa depan yang lebih baik. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v6i1.2040>
- Naufal, H. A. (2021). Literasi digital. *Perspektif*, 1(2), 195–202.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Nuri, P., Budiyanto, & suhermin. (2022). *Theory of planned behavior : implementasi perilaku electronic word of mouth pada konsumen marketplace*. 15.
- Nurindahsari, R., & Trisyanto, R. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi E-Government terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 251–257.
- Nurlaila Nurlaila, Zuriatin Zuriatin, & Nurhasanah Nurhasanah. (2024). Transformasi Digital Pelayanan Publik: Tantangan dan Prospek dalam Implementasi E-Government di Kabupaten Bima. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 21–37. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1468>
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Eka anugrah. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130–139.
- Pitrianti, S., Sampetoding, E. A. M., Purba, A. A., & Pongtambing, Y. S. (2023). Literasi Digital Pada Masyarakat Desa. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 43–49. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.655>
- Putri, N. M., Listiawati, W., & Rachman, I. F. (2024). Pengaruh literasi digital terhadap

- pemberdayaan masyarakat dalam konteks sdgs 2030. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(3), 349–360.
- Rahmaini, P. (2021). Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021. (*Journal Pd Social Science and Humanities*, 1(1), 46–51.
- Ratna Agustin, & Sayekti Suindyah Dwiningwarni. (2023). akuntabilitas menejemen keuangan daerah. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 280–286. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.891>
- Rizka, R., Muhammad, abdillah gembong, Santoso, iwan ahmad puji, Rafael, D. Y., Danu, A., & Maulana Akbar. (2024). inovasi e-government dalam meningkatkan kualitas administrasi pelayanan publik: studi kasus inovasi pemerintah daerah kabupaten jember. *Jurnal Interelasi*, 1(2), 62–79.
- Shafira, A., & Kurniasiwi, A. (2021). Implementasi e-government dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis online di kabupaten Kulon progo. *Jurnal Caraka Prabu*, 5(1), 52–68. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.457>
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.
- Sri Lestari, & Roy Valiant Salomo. (2022). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah di indonesia: sebuah tinjauan literatur. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 798–808. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2854>
- Sugiyono. (2020). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif da R&D*. PT Alfabet.
- Syafrial, H. (2023). *Literasi Digital* (1st ed.). PT Nas media indonesia anggota IKAPI.
- Syachronny, M., Rochim, A. I., & Murti, I. (2024). analisis penerapan egovernment pada aplikasi sistem pelayanan rakyat sidoarjo (sipraja) di desa prambon kecamatan prambon kabuoaten sidoarjo. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e- ISSN: 2797-0469), 4(06), 55–62. <https://doi.org/10.69957/paob.v4i06.1675>
- Tonnyl, T. (2022). Akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada kantor kecamatan kongbeng kabupaten kutai timur. *Jurnal Adminitrasi Publik*, 5(1), 123–140.
- Wahyuzan, A. putri, Purba, D. eldora, Azzahra, M. rahma, & Nasirwan. (2023). Implementasi e-government dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sistem pemerintahan modern: kajian literatur di kota medan. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 5(2).
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>

Yuhefizar, D., Huda, D. asrul, Gunawan, I., & eko hariyanto. (2021). *nakah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan e-government di provinsi sumatera barat*. 15–17.

